

Abstract

Judicial review authority in Indonesia is given to two judicial power holders, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. The existence of judicial review dualism, of course, has an impact on concerns about legal issues such as legal uncertainty that can disrupt the process of running the constitutional system in Indonesia. This study aims to analyze the idea of purifying the judicial review authority in the form of integration into the one-roof system at the Constitutional Court, using a normative juridical method that is aligned with the statutory approach and the case approach. The type of data used in this research is secondary data by collecting data using literature study and analyzed qualitatively.

The results of the study show that the form of judicial review dualism is not ideal based on the granting of different objects of authority but in the same hierarchical level. Changes to the constitution through the fifth amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia were chosen as an effort to resolve these legal issues.

Keywords: *Judicial review, Constitutional Court, Constitution*

Abstrak

Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia diberikan kepada dua pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adanya dualisme pengujian peraturan perundang-undangan tentu saja berdampak pada kekhawatiran timbulnya persoalan hukum seperti ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu proses berjalannya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisa gagasan memurnikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengintegrasian ke dalam sistem satu atap di Mahkamah Konstitusi, menggunakan metode yuridis normatif yang diselaraskan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya bentuk dualisme pengujian peraturan perundang-undangan tidaklah ideal didasari pada pemberian objek kewenangan yang berbeda namun dalam satu jenjang hierarki yang sama. Perubahan konstitusi melalui amandemen kelima Undang-Undang Dasar NRI 1945 dipilih sebagai upaya penyelesaian persoalan hukum tersebut.

Kata kunci: Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi, Konstitusi